

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Cina adalah negara terpadat di dunia dengan populasi lebih dari 1,35 miliar. Cina yang memiliki nama resmi Republik Rakyat Cina ini dikuasai oleh Partai Komunis dimana partai komunis adalah partai satu-satunya yang legal di sana.<sup>1</sup>

Antara Cina dan ASEAN pada awalnya tidak memiliki niat untuk pembangunan hubungan kerjasama dalam bidang apapun, justru ASEAN menganggap Cina adalah *aggressor* potensial menyusul runtuhnya kekaisaran Jepang menyisakan Cina sebagai *aggressor* potensial di Asia. Selain itu dalam mengambil sikap terkait laut, Cina mempertahankannya dengan keambiguan sehingga semakin membuat ASEAN ragu-ragu terhadap Cina.<sup>2</sup>

Deng Xiaoping saat memimpin Cina membawa angin segar dan perubahan dalam Cina terkait dengan hubungannya terhadap ASEAN, dengan cara mengurangi pengaruh komunisnya di ASEAN Deng Xiaoping melakukan pendekatan dengan ASEAN, hal ini dimaksudkan Deng Xiaoping untuk mendukung reformasi politik dan ekonominya.

---

<sup>1</sup> University of Southern California, *What are Cina's Largest and Richest Cities*, US-Cina Institute, 27 Agustus 2007, [Cina.usc.edu/\(S\(swqn0p55xbqmsu45cwo5lzy\)A\(IEcheuFczAEkAAAAODRINTk2OTMtMDViMC00Yjk5LWFmZTgtODc1OTA1YWYxMDM4e9e8O7-g5\\_HYhuft0Huy7h2GIGg1\)\)/ShowAverageDay.aspx?articleID=910](http://Cina.usc.edu/(S(swqn0p55xbqmsu45cwo5lzy)A(IEcheuFczAEkAAAAODRINTk2OTMtMDViMC00Yjk5LWFmZTgtODc1OTA1YWYxMDM4e9e8O7-g5_HYhuft0Huy7h2GIGg1))/ShowAverageDay.aspx?articleID=910), di akses 10 September 2013

<sup>2</sup> Gregory B. Polling, *"The South Cina in Focus: Clarifying the Limits of Maritime Dispute"*, CSIS, July 2013.

Selanjutnya hubungan Cina-ASEAN berkembang di masa Hu Jintao, sebagai presiden disaat itu, Hu Jintao terfokus dalam berbagai usaha memajukan Cina, terutama dari segi ekonomi. Hu Jintao adalah satu-satunya pemimpin Cina yang tidak banyak membuat perubahan dalam tubuh politik dan terkesan konservatif dalam perpolitikan. Hu Jintao melihat kawasan besar Laut Cina Selatan sebagai lautan uang, setengah perputaran perdagangan di dunia via laut melewati Laut Cina Selatan.<sup>3</sup> Hal inilah yang nantinya mendorong terbentuknya regionalisme ekonomi Cina-ASEAN.

Mencakup dari Singapura dan Malaka selat ke Selat Taiwan, Laut Cina Selatan merupakan salah satu daerah yang paling hangat diperdebatkan di dunia. Cina meletakkan klaim untuk hampir seluruh laut tumpang tindih dengan klaim maritim dari Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina dengan wilayah kedaulatan, sumber daya alam, dan kepentingan nasional dipertaruhkan. Sengketa ini mengancam stabilitas kawasan, namun tanpa memperdulikan isu keamanan tersebut, Cina tetap bisa mempertahankan kerjasamanya dengan ASEAN.

Signifikansi Selatan Laut Cina secara luas diakui oleh banyak pihak dalam navigasi internasional, maritim, eksploitasi sumberdaya alam, perlindungan lingkungan, dan efektivitas hukum-hukum internasional. Sengketa di Laut Cina Selatan kerap membahas perebutan kepulauan berkaitan dengan perbedaan pandang tentang batas masing-masing negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, seperti kasus di Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, dan zona maritim sejak 1990-an.<sup>4</sup> Upaya telah dilakukan oleh negara-negara regional untuk menstabilkan situasi dan mencari peluang

---

<sup>3</sup> Charle A Tayer, "*Cina's New Wave of Aggressive Assertiveness in the South Cina Sea*", CSIS, 20 Juni 2011.

<sup>4</sup> *Ibid.*

kerjasama di kawasan Laut Cina Selatan. Upaya-upaya ini telah menghasilkan, Deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan pada tahun 1992 yang diadopsi pada tahun 2002 dan Deklarasi ASEAN-Cina pada perilaku para pihak di Laut Cina Selatan, yang menurut semua pihak yang menandatangani perjanjian untuk mencari solusi damai, sengketa, dan melakukan kerjasama maritim dalam rangka menjaga stabilitas regional di Laut Cina Selatan.

Dengan menarik garis demarkasinya, Cina membuat klaim besar terhadap semua negara yang memiliki wilayah kelautan di Laut Cina Selatan. Beberapa negara telah membuat klaim-klaim teritorial atas Laut Cina Selatan. Perselisihan tersebut telah dianggap sebagai titik paling berbahaya di daerah Asia. Titik konflik perbatasan Cina tersebut, yaitu Kepulauan Spratly yang mana Cina bertabrakan dengan Vietnam dan Taiwan, sedangkan wilayah Kepulauan Scarborough Shoal Cina memperebutkannya dengan Filipina dan Taiwan, selain itu ada juga Kepulauan Paracel yang mana Cina memperjuangkannya melawan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Kepulauan-kepulauan kecil lain yang berada di Laut Cina Selatan pada dasarnya diperebutkan oleh semua negara ASEAN.<sup>5</sup>

Cina sangat bersikeras atas kedaulatan di Laut Cina Selatan karena akan menjadi keuntungan strategis bagi Cina mengingat bahwa lebih dari setengah tonase pedagang dunia, sepertiga dari perdagangan minyak mentah, dan setengah wisata perdagangan gas alam melalui perairan yang diperebutkan tersebut.

---

<sup>5</sup> Gaoyue Fan, “*Cina’s Maritime Interest*”, CSIS, Agustus 2011.

Dalam perkembangannya, Kepulauan Spratly dalam setiap pembahasan politik, ekonomi, dan militer, Cina tampaknya akan mengambil garis keras terhadap masalah ini. Pada bulan Maret 2010, para pejabat Cina tingkat tinggi dilaporkan menegaskan untuk mengunjungi pejabat AS bahwa Laut Cina Selatan mengklaim ditandai kepentingan inti untuk Beijing, Cina memperingatkan bahwa jangan sampai ASEAN melupakan apa yang pernah terjadi bahwa Cina pernah memberikan ‘pelajaran’ pada Vietnam pada tahun 1979.<sup>6</sup>

Memang sebelumnya Cina sangat keras terhadap tantangan dalam semua politisasi atas Laut Cina Selatan. Di satu sisi dalam bidang ekonomi Cina dan ASEAN telah membentuk energi politik, yaitu membentuk komunitas ekonomi baru meniru seperti apa yang sudah dicapai Uni Eropa. Pada saat yang sama, Amerika Serikat memperdalam hubungan strategis dengan Vietnam, Filipina, Singapura, dan Indonesia sebagai bagian dari poros Asia. Semua ini telah memicu kekhawatiran, bahwa di era meningkatnya persaingan besar-kekuasaan, ASEAN tidak mungkin bisa tetap bersama-sama. Namun pada akhirnya Cina tetap mempertahankan ambiguitasnya terkait dengan isu perbatasan Laut Cina Selatan.<sup>7</sup>

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Mengapa Cina tetap berusaha menjalin hubungan dengan ASEAN meskipun Cina terlibat berbagai konflik dengan negara ASEAN?

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 176.

<sup>7</sup> Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 22-33.

### 1.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variable-variable dan hubungan-hubungan antar variable berdasarkan konsep definisi tertentu. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa fenomena itu terjadi.<sup>8</sup> Konsep adalah abstraksi yang mewakili obyek atau fenomena.<sup>9</sup>

Morgenthau dalam memandang penentuan teori politik bahwasannya suatu teori politik harus bersubyek pada pengujian dua hal yaitu alasan dan pengalaman.<sup>10</sup> Untuk menghapuskan sebuah teori yang telah berkembang selama berabad-abad adalah dengan menghadirkan praduga modern yang menjamin superioritas kondisi saat ini dibandingkan masa lampau, bukan hanya sebuah argument rasional.<sup>11</sup>

Politik realisme meyakini bahwa politik, dipengaruhi oleh hukum-hukum obyektif yang berlandaskan kemanusiaan. Jauh sebelum Morgenthau sebenarnya arah pemikiran manusia sudah belajar untuk hal ini sejak masa "Renaissance" yaitu dengan pola pendekatan Immanuel Kant yang dia jabarkan dalam bukunya *Critique of Pure Reason* dalam memisahkan objek untuk di pelajari.<sup>12</sup> Sehingga model penulisan skripsi ini sesuai dengan nilai dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan

---

<sup>8</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal 219.

<sup>9</sup> Sofyan Efendi, *Unsur-unsur Pengertian Ilmiah*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal 14.

<sup>10</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Alfred A Knoff, New York, 1976, hal. 4.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago University Press, Chicago, 1982, hal. 15.

menciptakan karakter yang islami dan unggul dan tentunya modern.<sup>13</sup> Kaitannya dengan dunia sosial bahwa menurut Morgenthau untuk membangun masyarakat perlu dipahami hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Pelaksanaan hukum-hukum ini menjadi ganjalan bagi preferensi kita, orang yang menantanginya akan menemui resiko kegagalan.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya sesuai dengan disiplin ilmu Hubungan Internasional, kelahiran ilmu ini berdasarkan pengalaman gagalnya Liga Bangsa-bangsa sehingga pecahnya perang dunia II kala itu banyak aliran pemikiran yang berkembang adalah pemikiran/ideologi idealisme, sehingga pola pemikiran yang umum di pakai sekarang, yaitu realisme.<sup>15</sup> Sehingga pokok penekanan di skripsi ini adalah dengan pemakaian pola realisme yang meyakini seperti apa adanya obyektifitas hukum-hukum politik, juga percaya kemungkinan pengembangan sebuah teori rasional meskipun tidak sempurna dan berat sebelah.<sup>16</sup>

Realisme yang akan menjadi tolak ukur dan cara pandang di sini dipahami oleh penulis, bahwa hal itu tidak menolak kemungkinan adanya perbedaan pendekatan dari setiap ahli, namun dengan pendekatan ini di harapkan dapat menemukan fakta-fakta dan memberikan arti berdasarkan alasan tertentu.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 14. Di sini Rahman berasumsi bahwa proses pemahaman manusia akan objek selalu di kembalikan tentang bagaimana objek itu berasal, kenapa tidak mengisolasi objek tersebut tanpa harus mengkaitkan bagaimana asalnya objek tersebut, sehingga kita bias memahami objek tersebut secara utuh dan objektif, contoh: bagaimana gunung-gunung tinggi itu bias ada, lalu seseorang menjawab “itulah kehebatan Tuhan, Tuhan mampu menciptakan gunung-gunung yang tinggi” di mana jawaban ini pada dasarnya tidak menjawab pertanyaan yang ada.

<sup>14</sup> Hans J. Morgenthau, *Op.Cit.*,hal. 4.

<sup>15</sup> Jürgen Habermas, *The Philosophical Discourse of Modernity*, Polity Press, Cambridge, hal. 2.

<sup>16</sup> Timothy J. Sinclair dalam Peer Schouten, *Theory Talks*, LP3M UMY & PPSK, Yogyakarta, 2012, hal 14.

Untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi serta untuk memilih konsep yang tepat dalam membentuk hipotesa, maka diperlukan suatu kerangka teoritis. Untuk menjelaskan kepentingan Cina terhadap Laut Cina Selatan paska perang dingin, penulis menggunakan:

### ***Teori Saling ketergantungan (Interdependensi)***

Teori Interdependensi atau saling ketergantungan merupakan sebuah teori yang lahir dari perspektif liberalis yang terdapat dalam hubungan internasional. Interdependensi akan menciptakan dunia hubungan internasional yang jauh lebih kooperatif dan menguntungkan bagi pihak – pihak yang berinteraksi di dalamnya. Aktor transnasional menjadi semakin penting dan kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dari negara. Saling ketergantungan mengacu pada situasi yang di karakteristikkan dengan timbal balik antar aktor negara yang berbeda, efek ini merupakan hasil dari transaksi internasional, yaitu aliran arus barang, uang, manusia, dan informasi yang melewati batas-batas negara. Saling ketergantungan menyebabkan adanya interaksi antar negara, J Frankel mengawalinya dengan mengetengahkan tipe-tipe hubungan yang ada dan berlangsung dalam politik internasional, terdapat dua tipe hubungan yang ekstrim, yaitu konflik dan kerjasama, sedangkan situasi yang jatuh diantara dua tipe yang ekstrim ini disebut sebagai persaingan. Hubungan antar negara ditentukan oleh sifat negara dan masyarakat internasional.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Drs. R. Soeprapto, *Hubungan Internasional, Sistem Interaksi dan Prilaku*. 2004.

Menurut Mohtar Mas'ood dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, interdependensi adalah sebagai kontak atau pertukaran (*exchange*) diantara bangsa-bangsa, interdependensi timbul akibat tindakan suatu pemerintah dan sebagian oleh pemerintah lain. Pengertian interdependensi ini bersifat positif, karena bisa membuka suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan.

Tahun 1990an menjadi era meningkatnya kunjungan antara Cina dan Asia tenggara, dan serangkaian perjanjian, memorandum, deklarasi, dan pernyataan ditandatangani pada kesempatan tersebut. Inisiatif politik ini menjadi dasar dari perluasan aktivitas ekonomi antara Cina dan Asia tenggara di tahun 1990an termasuk perdagangan, investasi, bantuan luar negeri, dan turisme.

Nampaknya Cina mengalami perubahan yang baik dihubungan ekonominya dengan Asia tenggara sejak tahun 1990an. Sebelum kebijakan *open door*, Cina hanya memiliki volume perdagangan yang rendah dengan negara-negara Asia tenggara. Semenjak tahun 1988 baru terlihat perkembangan perdagangan Cina dengan Asia tenggara, sebagai contoh, volume perdagangan bilateral antara Cina dan Asia tenggara sebesar \$3,8 milyar, tetapi jumlah ini terus meningkat dari \$4,3 milyar di tahun 1990 dan menjadi \$10,6 milyar di tahun 1993 dan menjadi \$19.4 milyar di tahun 1995. Selain memperbaiki hubungan dengan negara di region tersebut, Cina juga mulai partisipasi di dalam kegiatan ASEAN.

Perekonomian Cina terus berkembang semenjak implementasi dari kebijakan *open door*. Cina menjadi semakin kuat dari awal 1990an dan terus menguat saat memasuki abad baru. Walaupun begitu, pemimpin Cina tetap memikirkan langkah baru



untuk menentukan kebijakan luar negerinya. Di tahun 2002, dimana merupakan tahun pertama Cina memasuki *World Trade Organization* (WTO) membuat China mempunyai peluang untuk membangun hubungan ekonomi politik yang lebih dekat dengan negara lain di bawah kerangka institusi WTO.

Dengan begitu pemimpin Cina mengajukan strategi “*going global*” yang bertujuan untuk membawa perusahaan Cina ke luar negeri, kebalikan dari kebijakan *open door* dimana itu mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di pasar Cina. Menurut menteri perdagangan Cina, beberapa langkah diambil pada tahun 2002 untuk mempromosikan kebijakan “*going global*” seperti membuat hukum dan regulasi untuk perusahaan asing, memperbaiki administrasi untuk pekerja asing, membantu perusahaan untuk mengambil proyek skala besar di negara lain. Tahun 2002, juga menjadi saksi dimana hubungan Cina dengan ASEAN yang menjadi semakin dekat. Cina mencapai beberapa perjanjian penting dan mengadakan rapat penting dengan ASEAN, termasuk perjanjian untuk mengadakan area perdagangan bebas di pertemuan ASEAN-Cina yang ke 6 pada 4 November 2002. Selain menjalankan kebijakan “*go global*” kebijakan *good neighbor* juga masih dijalankan. Hu Jintao menyebutkan 3 kunci utama kebijakan Cina terhadap Asia tenggara, yaitu *good neighbours*, *stabilizing neighbours*, dan *enriching neighbours*. Strategi *go global* sebenarnya merupakan kontinuitas dari kebijakan *good neighbor*.

Dengan adanya penyesuaian-penyesuaian hubungan Cina dengan negara-negara Asia Tenggara maka beberapa negara ASEAN kemudian meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangannya dengan Cina. Perdagangan antara Cina dan

negara-negara anggota ASEAN telah berjalan selama beberapa tahun ke belakang, Namun perdagangan ini lebih bersifat bilateral antara Cina dan salah satu negara anggota ASEAN. perkembangan ekspor Cina meningkat dalam 2 dekade terakhir ini, dan peningkatan ini sangatlah signifikan sehingga mendorong Cina menjadi negara ke 5 dengan jumlah pengekspor terbesar. Hubungan ASEAN-Cina mulai terjalin ketika menteri luar negeri Cina menghadiri *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) atau pertemuan antar menteri luar negeri ASEAN ke 24 di Kuala Lumpur pada tanggal 19-24 Juli 1991. Pada saat pertemuan AMM ke 25 pada tahun 1992, Cina kembali diundang sebagai tamu ASEAN. Pada saat itu Menlu Cina menawarkan dibentuknya *ASEAN-China Consultative Relationship*, serta menawarkan kerjasama ASEAN di bidang Iptek dan perdagangan. Hubungan perdagangan ASEAN dan Cina berkembang dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan kedua ekonomi negara tersebut. Dalam 10 tahun terakhir, perdagangan antara Cina dan ASEAN tumbuh dari \$8 trilyun pada tahun 1991, menjadi \$40 trilyun pada tahun 2001. Meningkatnya interdependensi ekonomi antara Cina dan ASEAN akan lebih diperlukan untuk meningkatkan intra industri antara Cina dan ASEAN. Dengan adanya perjanjian *free trade*, diharapkan Cina akan menjadi partner dagang yang baik dibandingkan menjadi kompetitor. Dengan terbentuknya *Free Trade Agreement* ini, maka secara tidak langsung globalisasi mengambil peran untuk hubungan antar Negara tersebut.

Globalisasi atau lebih tepatnya globalisasi neoliberal telah menantang kapasitas ekonomi politik negara bangsa. Dalam bidang politik, negara bangsa tidak lagi menjadi aktor tunggal, Sekalipun keberadaannya tetap menjadi unit penting dalam ekonomi

politik global dewasa ini. Globalisasi dalam kerangka *world politics* tidak dapat dipisahkan dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi juga identik dengan paham liberalisme yang mempromosikan konsep *free trade* dan interdependensi. Dewasa ini, ASEAN dan Cina adalah Negara yang mempunyai ekonomi yang kian meningkat dan keduanya sangat penting untuk pengembangan Asia Timur untuk di kemudian hari. Secara umum Cina memang lebih unggul dalam ekonomi global dibandingkan dengan ASEAN. Agar ekonomi mereka semakin maju, mereka membutuhkan integrasi yang konsisten baik dalam perdagangan maupun investasi dan lebih mendalami hubungan dengan wilayahnya maupun dengan dunia luar lainnya.

Dewasa ini, sikap ASEAN masih mendua dikarenakan secara ekonomi Cina semakin menantang, pada saat yang sama Cina juga muncul sebagai ancaman bagi ASEAN, dimana pada awal tahun 1990-an meski Indonesia dan Singapura membuka kembali hubungan diplomasi dengan Cina, mereka juga dengan cepat membuka pintu kerja sama dengan negara lain dalam bentuk penyediaan basis militer yang terbatas. Sementara itu, negara-negara ASEAN juga mencurigai Cina sebagai induk dari gerakan komunis yang ada di Asia Tenggara. Lebih dari itu, mayoritas penduduk negara-negara ASEAN sendiri adalah muslim dan kristen sementara Cina komunis atheis. Banyaknya perantau Cina yang sukses di negara-negara ASEAN menambah daftar kecurigaan ASEAN terhadap Cina atas kemungkinan gerakan politik orang-orang

perantau Cina tersebut. Tidak mengherankan jika agama dan ideologi menjadi suatu penghalang hubungan Cina dengan ASEAN pada awalnya.<sup>18</sup>

Sebagai salah satu negara penganut ideologi komunis, hubungan Cina dan ASEAN pada awalnya dipenuhi rasa saling curiga karena sebagian besar negara ASEAN dikendalikan oleh Amerika Serikat sebagai kampiun ideologi liberal dan merupakan musuh ideologi komunis. Selain itu, sebagian besar penduduk ASEAN merupakan muslim dan Nasrani yang tentunya berseberangan dengan Cina yang berpaham atheis. Pada dasarnya ASEAN memiliki strategi keamanan mengenai tatanan regional. Terdapat semacam anjuran bahwa kunci yang dibawa oleh regionalisme di ASEAN bersandar pada dua jalan utama untuk menuju pada tatanan regional, yakni "*omni-enmeshment of major powers*" dan "*complex balance of influence*" implementasi dari keduanya bertujuan lebih untuk mengatur tatanan regional dibandingkan untuk mencegah terjadinya transisi kekuatan. ASEAN juga tidak menghiraukan adanya batas-batas antara militer, ekonomi, dan kekuatan politik; menghilangkan distingi-distingi yang dapat mengaburkan ikatan di antara negara-negara anggota ASEAN serta melaksanakan prinsip *containment* atau menantang adanya asumsi bahwa pengaturan tatanan regional hanya merupakan bisnis dari negara-negara dunia yang memiliki kekuatan besar.<sup>19</sup>

Cina tumbuh sebagai kekuatan ekonomi dunia yang baru, Cina merupakan salah satu dari 5 kekuatan besar dunia dan tentunya tidak ingin dominasinya di kawasan Asia

---

<sup>18</sup> Mondejar, Reuben and Wai Lung Chu, "ASEAN-China Relations: Legacies and Future Directions", dalam Ho Khai Leong and Samuel C.Y Ku (eds), *Cina and southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges*, ISEAS, Singapura, 2005, hal. 127.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Tenggara ”diambil alih” oleh kekuatan lain. Hubungan kerja sama Cina dengan ASEAN lebih merupakan upaya mengambil kepercayaan guna eksisnya kekuatan dominasi dan hegemoni Cina di Asia Tenggara, selain karena ingin mendapat dukungan politik atas kasus Taiwan.. Masa depan ASEAN lebih ditentukan akan pergerakannya mereka dalam mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari kerjasama dengan Amerika Serikat dan Cina sebagai bentuk kebijakan penyeimbang kekuatan besar dunia di kawasan Asia Tenggara dengan tetap menjaga hubungan baik antara keduanya.<sup>20</sup>

Hal ini mampu menjelaskan tentang alasan kenapa Cina tetap bisa membangun hubungan dan kerja sama dengan ASEAN yang notabene pernah salah satu anggotanya, yaitu Vietnam di serang oleh Cina dan mayoritas anggota negara dari ASEAN memiliki isu perbatasan di Laut Cina Selatan.

*Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) telah menjadi salah satu instrumen politik luar negeri Cina dalam mengejar kepentingan ekonomi dan keamanannya di kawasan Asia Tenggara. Instrumen ini digunakan Cina sejak negara ini memutuskan untuk membuka dirinya kepada ASEAN. Hingga sekitar 1980-an, Cina adalah satu-satunya negara di Asia yang berorientasi kepada negara maju, bukan kepada negara tetangganya di kawasan. Cina juga merupakan satu-satunya negara dunia ketiga yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap menjaga jarak ini antara lain ditunjang oleh aspek historis Cina yang mengarahkan kepada ketatnya kontrol yang dilakukan pemerintah terhadap hubungan dengan negara lain. Namun, transformasi

---

<sup>20</sup> Evelyn Goh, *Op.Cit.*, hal. 1-19.

terhadap sikap ini kemudian muncul ketika Perang Dingin usai.<sup>21</sup> Meskipun telah memiliki hubungan bilateral yang baik dengan beberapa negara anggota ASEAN, Cina tidak memiliki hubungan yang erat dengan ASEAN sebelum era 1990-an. Pada 1991, Cina menjadi *Consultative Member* di ASEAN dan pada 1996, ASEAN secara resmi menjadikan Cina sebagai mitra dialog pada 29th *ASEAN Ministerial Meeting* di Jakarta. Pada awal 1997, lima kerangka dialog terjalin antara ASEAN dengan Cina, yakni *China-ASEAN Political Consultation*, *China-ASEAN Joint Committee on Economic and Trade Cooperation*, *ASEAN-China Joint Cooperation Committee (ACJCC)*, *China-ASEAN Joint Committee on Scientific and Technological Cooperation*, dan *ASEAN Beijing Committee*. Pertemuan konsultasi juga dilakukan Cina pada *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *the Post Ministerial Conference (PMC) 9+1*, *the Joint Cooperation Committee (JCC)*, *ASEAN-China Senior Official Meeting (SOM)* dan *ASEAN-China Business Council Meeting*.<sup>22</sup>

Keuntungan ekonomi tentu dapat diperoleh melalui kerjasama Cina dengan ASEAN. Menurut Swee-Hock, perdagangan antara Cina dengan ASEAN tergolong menjalani perkembangan yang sangat cepat dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 20,8 persen sejak 1990 hingga 2003. Hingga 2005, ASEAN menjadi mitra kerjasama kelima terbesar bagi Cina. Sedangkan Cina merupakan mitra kerjasama keenam bagi ASEAN. Investasi ASEAN di Cina meningkat rata-rata sekitar 28 persen sejak 1991 hingga 2000. Walaupun investasi Cina ke ASEAN masih terhitung sedikit, namun hingga 2001

---

<sup>21</sup> M. Yahuda, *"The International Politics of the Asia-Pacific, 1945-1995"*, Routledge, London, 1995, hal. 186-211.

<sup>22</sup> Swee-Hock, S., Lijun S., dan Wah C.K, *"ASEAN-China Relations, Realities and Prospects"*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2005, hal. 1-2.

jumlah investasi tersebut adalah sekitar 7,7 persen dari seluruh investasi Cina di luar negeri. Pada *ASEAN-China Summit* November 2001, Cina mengusulkan ide pembentukan *China-ASEAN Free Trade Area* (CAFTA).

Selain keuntungan ekonomi, keuntungan keamanan juga dapat diperoleh dalam interaksi Cina dengan ASEAN. Interaksi Cina-ASEAN dalam hal keamanan diawali pada Desember 1997. Presiden Cina Jiang Zemin bertemu muka dalam pertemuan informal kepala Negara (ASEAN+1) dan merancang *joint statement*. Sejak 1999 hingga 2000 China telah menandatangani kerangka kerja dokumen dalam kerjasama bilateral dengan seluruh negara anggota ASEAN. Kerjasama dalam *transnational non traditional security threats* terutama dalam hal *drug trafficking* terwujud dalam *Beijing Declaration* pada Agustus 2001 antara Cina, Laos, Myanmar dan Thailand. Hal ini diikuti dengan penandatanganan *Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the field of Non Traditional Security Issues*. Pada 2003, Cina menandatangani *ASEAN Security Protocol* yang penting, yaitu *The Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Kerjasama dengan masing-masing negara anggota ASEAN dilakukan dengan kunjungan antara pemimpin militer, pelatihan militer dan bantuan persenjataan, teknologi militer dan kunjungan pelabuhan.<sup>23</sup>

#### **1.4. Hipotesis**

Dari permasalahan di atas, maka dapat ditarik sebuah hipotesa, yaitu bahwa untuk mempertahankan perekonomian Cina, mereka membutuhkan hubungan dan kerja

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 2-3.

sama dengan ASEAN sebagai pangsa pasar dan berbagai instrumen diplomasi untuk meredam isu perbatasan di Laut Cina Selatan.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mengetahui motif apa yang melatarbelakangi Cina membangun hubungan dan kerjasama dengan ASEAN
2. Mengetahui kenapa Cina tetap bersihkeras menjaga hubungan dan kerjasamanya dengan ASEAN, sedangkan di sisi lain diantara kedua belah pihak, Cina dan ASEAN sama – sama memiliki isu perbatasan di Laut Cina Selatan
3. Secara teoritis maupun metodologis, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan pendalaman studi Ilmu Hubungan Internasional

### **1.6. Metode Pengumpulan Data**

Penulisan ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka teori dan konsep, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan dengan data-data empiris.



Pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research*. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, internet dan sumber-sumber lain. Penulis juga memanfaatkan fasilitas internet serta sumbangsih dunia pers yang terhimpun lengkap pada koleksi koran yang memuat berita maupun komentar tentang subjek yang penulis pilih.

### **1.7. Jangkauan Penelitian**

Dalam skripsi ini penulis memberi batasan penelitian dari tahun 1978 karena 3 tahun sebelumnya Amerika menarik pasukannya dari Vietnam sehingga menyisakan Cina sebagai kekuatan besar di Asia terutama di Asia Tenggara, selain itu di tahun 1978 ini Deng Xiaoping mulai melancarkan reformasi ekonominya dan memandang bahwa Cina perlu memisahkan urusan ekonomi dan politik, seta menjalin kerjasama dagang hingga kerjasama dengan negara-negara ketiga, hal ini di dukung kuat pada tahun 1997, Cina diundang masuk ke dalam forum ASEAN, kondisi yang ada pada saat itu bahwasannya mayoritas negara-negara anggota ASEAN terkena dampak krisis ekonomi, sehingga Cina bisa masuk dan memiliki nilai 'bargaining' tersendiri, ini tidak hanya menguntungkan pihak Cina semata namun hal ini juga di inginkan oleh negara-negara anggota ASEAN, selain itu dengan absennya Amerika dan sekutunya karena berakhirnya perang dingin membuat Cina menjadi kekuatan besar yang tersisa di Asia Tenggara, sehingga pembatasan waktu bisa diidentifikasi dari dua agenda seperti yang

sudah di sebut di atas. Masuknya Cina dalam forum ASEAN dan berakhirnya perang dingin, namun pembahasan tetap tidak menutup kemungkinan di luar tahun tersebut dianggap sebagai pemicu.

## **1.8. Sistematika Penulisan**

**BAB I** Pada bab ini akan memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan

**BAB II** Akan menjelaskan tentang dinamika hubungan Cina dan ASEAN dari sejak terbentuknya ASEAN, Cina di masa Deng Xiaoping hingga hubungan Cina-ASEAN paska perang dingin

**BAB III** Bercerita tentang isu perbatasan di Laut Cina Selatan antara Cina dan mayoritas negara-negara anggota ASEAN

**BAB IV** Ini akan menjabarkan tentang Regionalisme ekonomi yang terjadi antara Cina dan ASEAN

**BAB V** Kesimpulan